

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Alan Bryman. *Quantity and Quality in Social Research*. (London: Unwin Hyman, 1988).
- Alfred Kadushin & Goldie Kadushin. *The Social Work Interview: A Guide for Human Service Professionals*. (Belmont: Brooks/Cole, 1997).
- Ayya Sofia Annisa. *Warga Negara dan Penjara*. (Yogyakarta: PolGov, 2014).
- Bagir Manan. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. (Bandung: YHDS, 2001).
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*. (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996).
- Budiyanto. *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*. (Jakarta: Erlangga, 2000).
- Christine Marlow. *Research Methods for Generalist Social Work: 5<sup>th</sup> Edition*. (Belmont: Brooks/Cole, 2011).
- David E. McNabb. *Research Methods in Public Adminsitration and Nonprofit Management: Quantitative and Qualitative Approaches*. (New York: M.E. Sharpe, 2008).
- David Royse. *Research Methods in Social Work: 6<sup>th</sup> Edition*. (Belmont: Brooks/Cole, 2011).

- Denisa Kostovicova & Marlies Glasius. *Bottom-Up Politics: An Agency-Centred Approach to Globalization*. (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2011).
- Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2009).
- Earl Babbie. *The Practice of Social Research*. (Belmont: Wadsworth, 2013).
- Harry Elmer Barnes & Negley K. Teeters. *New Horizons in Criminology: 3<sup>rd</sup> Edition*. (New Jersey: Prentice-Hall, 1959).
- John Gerring. *Social Science Methodology*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2001).
- Joko J. Prihatmoko. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Kadri Husin & Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Kuntjoro Purbopranoto. *Hak-hak Azasi Manusia dan Pancasila*. (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1975).
- Majda El-Muhtaj. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2005).
- Manfred Nowak. *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*. (Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute, 2003).

- Michael Freeman. *Human Rights: An Interdisciplinary Approach*.  
(Cambridge: Polity, 2011).
- Norman K Denzin & Yvonna S. Lincoln. (Ed). *Strategies of Qualitative Inquiry*. (New Delhi: Sage Publications, 1998).
- Nurul Qamar. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*.  
(Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- P.A.F. Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. (Bandung: Armico, 1984).
- Robert A. Dahl. *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1985).
- Robert C. Bogdan & Sari Nop Biklen. *Qualitative Research in Education: An Introduction to Theory and Methods*. 3<sup>rd</sup> edition. (London: Allyn and Bacon, 1998).
- Rulam Ahmadi. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).
- Sarundajang. *Pilkada Langsung: Problematika dan Prospek*. (Jakarta: Ikapi, 2012).
- Scott Davidson. *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994).
- Sigit Pamungkas. *Perihal Pemilu*. (Yogyakarta: JIP, 2009).
- Soedjono D. *Penanggulangan Kejahatan*. (Bandung: ALUMNI, 1976).

- Tim Peneliti MaPPI FHUI, KRHN dan LBH Jakarta. *Menunggu Perubahan dari Balik Jeruji: Studi Awal Penerapan Konsep Pemasyarakatan*. (Jakarta: Partnership for Governance Reform, 2007).
- Tongat. *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem hukum Pidana di Indonesia*. (Malang: UMM Press, 2004).
- Todung Mulya Lubis. *Hak Asasi Manusia dan Kita*. (Jakarta: Sinar Harapan, 1982).

## B. Jurnal

- *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. (Yogyakarta: UII Press, No 10 Vol 5, 1998).
- *New Zealand Journal of Public and International Law*. (Wellington: The New Zealand Centre for Public Law, Vol 4, November 2006).
- *Probation Journal*. (Sage Publications, Vol 56, 2009).

## C. Peraturan Hukum

- Persatuan Bangsa-bangsa. *Konvenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)*.
- Persatuan Bangsa-bangsa. *Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights)*.

- Persatuan Bangsa-bangsa. *Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights).*
- Persatuan Bangsa-bangsa. *Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa (United Nations Charter).*
- Republik Indonesia. *Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi*
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.*
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.*
- Republik Indonesia. *Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614 sebagai Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.*
- Republik Indonesia. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang.*
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang*

*Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota  
Menjadi Undang-undang.*

- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.*
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.*
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibu Kota NKRI.*
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.*

#### **D. Internet**

- Ahmad Mustaqim. Tak Ada Fasilitas, Napi Wirogunan tak Bisa Ikut Pilkada. Diakses 5 Juni 2017. Dari <http://www.metrotvnews.com/amp/xkEmy9Mk-tak-ada-fasilitas-napi-wirogunan-tak-bisa-ikut-pilkada>
- Ardi Mandiri. *LBH: Hak Pilih Warga Lapas Bandarlampung Dihilangkan saat Pilkada.* Diakses 24 Juni 2017. Dari <http://www.suara.com/news/2015/12/15/071752/lbh-hak-pilih-warga-lapas-bandarlampung-dihilangkan-saat-pilkada>

- Egi Adyatama, Diko Oktara & Gangstar Parikesit. *Pilkada DKI, Sebagian Warga Jakarta Kehilangan Hak Pilih*. Diakses 1 Juni 2017. Dari <https://pilkada.tempo.co/read/news/2017/02/17/348847442/pilkada-dki-sebagian-warga-jakarta-kehilangan-hak-pilih>
- Freedom House. *Methodology*. Diakses 17 April 2017. Dari [https://freedomhouse.org/report/freedom-world-2008/methodology?page=351&ana\\_page=341&year=2008](https://freedomhouse.org/report/freedom-world-2008/methodology?page=351&ana_page=341&year=2008)
- Komisi Pemilihan Umum. *Pilkada Kabupaten Kulon Progo*. Diakses 11 Juli 2017. Dari [https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/daerah\\_istimewa\\_yogyakarta/kulon\\_progo](https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/daerah_istimewa_yogyakarta/kulon_progo)
- Komisi Pemilihan Umum. *Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017*. Diakses 5 Juni 2017. Dari [https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/form\\_c/42325/42368/11](https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/form_c/42325/42368/11)
- LBH Yogyakarta. *Hak Sipil sebagai Pelindung Kebebasan Fundamental Individu*. Diakses 18 Mei 2017. Dari <http://www.lbhyogyakarta.org/2013/04/hak-sipil-sebagai-pelindung-kebebasan-fundamental-individu/>
- Luqman Hakim. 364 Warga Binaan Lapas Wirogunan Yogyakarta Mencoblos. Diakses 10 Juli 2017. Dari <http://jogja.antaranews.com/berita/323898/364-warga-binaan-lapas-wirogunan-yogyakarta-mencoblos>

- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. *Perpres Rencana Aksi Nasional HAM 2015-2019 Diteken, Ada Sekretariat Bersama*. Diakses 15 Maret 2017. Dari <http://setkab.go.id/perpres-rencana-aksi-nasional-ham-2015-2019-diteken-ada-sekretariat-bersama/>
- The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. *What are Human Rights?*. Diakses 9 Maret 2017. Dari <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx>
- . KPU Tidak Memiliki Aturan Pindah Pemilih dalam Pilkada Bupati/Walikota. Diakses 10 Juni 2017. Dari <http://waspada.co.id/pilkada/kpu-tak-miliki-aturan-pindah-pemilih-dalam-pilkada-bupatiwali-kota/>